



KOTA SAMARINDA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud.

Penyusunan Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi sebagai pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Anggaran Sekretariat Kota Samarinda, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis.

2. Tujuan.

Penyusunan Laporan Keuangan bertujuan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan (Sekretariat Daerah Kota Samarinda) atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya yaitu informasi mengenai :

- 1) Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 2) Ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- 3) Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas serta perubahannya;
- 4) Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 5) Potensi entitas pelaporan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Hal yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan sebagaimana disebut diatas terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lampiran LRA disusun sesuai program dan kegiatan yang berada pada Sekretariat Kota Samarinda sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 2) Neraca Daerah,
Neraca Daerah per 31 Desember 2024 ini merupakan neraca yang disesuaikan sehubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggambarkan posisi keuangan Sekretariat Kota Samarinda.
- 3) Laporan Operasional,
Laporan Operasional ini menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional Sekretariat Kota Samarinda.
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Perubahan Ekuitas ini menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Pembahasan kinerja keuangan sesuai program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Kota Samarinda yaitu :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 ;
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

19. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD.
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Memuat penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Memuat penjelasan mengenai sistematika penyajian dan penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro
Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang melandasi penyusunan laporan keuangan SKPD.

2.2 Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SKPD yakni tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan periode sebelumnya.

2.3 Indikator Pencapaian target kinerja Keuangan SKPD

Memuat penjelasan mengenai informasi kinerja keuangan beserta penjelasan mengenai keberhasilan dan kegagalan kinerja Anggaran Sekretariat Kota Samarindayang dicerminkan melalui indikator pelaksanaan program/ kegiatan.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Anggaran SekretariatKota Samarinda, terutama realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Memuat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan baik bersifat yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan.

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Penjelasan Neraca Per 31 Desember 2024

4.2 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran 2024

4.3 Penjelasan Laporan Operasional

4.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBDSEKRETARIAT KOTA SAMARINDA

2.1. Ekonomi Makro

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Sekretariat Kota Samarinda tahun 2024 berdasarkan asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan didasarkan pada PPAS yang telah disepakati.

2.2. Kebijakan Keuangan

Sekretariat Kota Samarinda telah menetapkan Kebijakan Umum dalam pelaksanaan anggaran yang ada yakni sebagai berikut :

Dalam hal kebijakan umum pendapatan dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi untuk memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan. Sedang dalam hal kebijakan umum belanja dengan melakukan langkah-langkah penghematan melalui penerapan anggaran berbasis kinerja yakni pengeluaran belanja digunakan seefektif dan seefisien mungkin dengan memanfaatkan plafon anggaran yang tersedia.

Adapun realisasi Pendapatan serta kinerja belanja untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, yang bersumber dari anggaran Belanja Tidak Langsung dan Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan

Realisasi Anggaran Pendapatan Sekretariat Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebesar Rp.84.000.000,00 atau sekitar 93,33%. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pendapatan

Retribusi Daerah berupa hasil dari Penyewaan Bis Pemkot Samarinda selama tahun 2024.

b. Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 pada Sekretariat Kota Samarinda adalah sebesar Rp.149.565.029.710,00 atau sekitar 94,64 % dari anggaran yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.159.723.142.711,00.

Dengan rincian per rekening sebagai berikut :

NO	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA
			(Rp)	(%)	
1	BELANJA OPERASI	125,138,823,117.00	115,589,702,395.00	92.37	9,549,120,722.00
1	Belanja Pegawai	35,963,899,487.00	33,021,985,713.00	91.82	2,941,913,774.00
2	Belanja Barang dan Jasa	84,118,799,630.00	77,891,592,682.00	92.60	6,227,206,948.00
3	Belanja Hibah	5,056,124,000.00	4,676,124,000.00	92.48	380,000,000.00
2	BELANJA MODAL	34,584,319,594.00	33,975,327,315.00	98.24	608,992,279.00
1	Belanja Modal Tanah	28,519,000,000.00	28,519,000,000.00	100.00	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,609,708,634.00	5,082,461,440.00	90.60	527,247,194.00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360,610,960.00	343,865,875.00	95.36	16,745,085.00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95,000,000.00	30,000,000.00	31.58	65,000,000.00
	JUMLAH	159,723,142,711.00	149,565,029,710.00	93.64	10,158,113,001.00

Dari data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 dari sisi keuangan pada Sekretariat Kota Samarinda telah menyerap dana sebesar 93,64% dari anggaran yang disediakan. Dana yang belum terserap adalah Belanja Operasi sebesar 7,63% dan Belanja Modal sebesar 1,76%.

Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut :

Terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah 60% yakni :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.167.811.924,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.990.417.230,00 atau sekitar 16,94%.

2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.53.736.762,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.91.000.000,00 atau sekitar 59,05%.

3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.72.242.470,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.136.410.000,00 atau sekitar 52,96%

4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.82.361.127,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.384.684.000,00 atau sekitar 21,41%.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Anggaran Sekretariat Kota Samarinda dan KDH/WKDH Kota Samarinda

Dalam tahun anggaran 2024 sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2024 terdapat 3 program dan 19 kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan pencapaian untuk masing-masing program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan berikut ini :

2.3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA, ada 11 kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp. 236.842.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 250.475.000,00 atau sekitar 94,56%. Dengan terserapnya

anggaran sebesar Rp. 236.842.000,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sangat baik.

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp. 113.173.101,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 114.170.000,00 atau sekitar 99,13%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 113.173.101,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sangat baik.

1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, dan Belanja Makanan dan Minuman

Rapat. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp. 68.371.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 68.895.000,00 atau sekitar 99,24%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 68.371.000,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sangat baik.

- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan untuk ASN dan PPPK serta Belanja Tambahan Penghasilan untuk ASN dan PPPK. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp. 27.212.252.789,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 29.293.604.559,00 atau sekitar 92,89%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 27.212.252.789,00 maka kebutuhan Gaji dan Tunjangan untuk ASN dan PPPK serta Tambahan Penghasilan untuk ASN dan PPPK telah terpenuhi dan mendukung pencapaian target Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sangat baik.

2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Tenaga Supir, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan

Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, dan Belaja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.6.077.577.872,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.088.290.832,00 atau sekitar 99,82%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 6.077.577.872,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sangat baik.

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Pakaian Olahraga, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.570.494.149,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 591.499.950,00 atau sekitar 96,45%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.570.494.149,00 maka telah mendukung pencapaian target Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sangat baik.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR), Belanja Pakaian Adat Daerah , dan Belanja Pakaian Batik Tradisional. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp. 2.588.936.150,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.652.566.400,00 atau sekitar 97,60%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 2.588.936.150,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sangat baik.

3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam tahun 2024 sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp. 201.360.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 atau sekitar 80,54%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 201.360.000,00 maka

telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan baik.

3.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dan Belanja Bimbingan Teknis. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.212.750.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.301.530.000,00 atau sekitar 70,56%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.212.750.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan cukup baik.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air dan Listrik, dan Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.294.3337.063,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.320.423.377,00 atau sekitar 98,02%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.1.294.3337.063,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sangat baik.

4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan, Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor, Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, Belanja Sewa Mebel, Belanja Sewa Alat Pendingin, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor, Belanja Sewa Pagar, Belanja Sewa Audio Visual, Belanja Modal Mesin Proses, Belanja Modal Pompa, Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang, Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools), Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Peralatan Studio Audio, Belanja Sewa Tanaman, Belanja Modal

Pompa, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Personal Computer, Belanja Modal Peralatan Jaringan, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, Belanja Modal Elektronik/Electric, dan Belanja Modal Lukisan dan Ukiran. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.10.519.534.630,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.11.619.508.834,00 atau sekitar 90,53%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.10.519.534.630,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sangat baik.

4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Modal Mesin Proses, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use). Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.576.803.600,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.798.559.800,00 atau sekitar 72,23%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.576.803.600,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan cukup baik.

4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.4.121.641.311,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.303.020.000,00 atau sekitar 95,78%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.4.121.641.311,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sangat baik.

4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.739.243.900,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.838.463.000,00 atau sekitar 94,60%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.1.739.243.900,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sangat baik.

4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Dalam tahun 2023 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan

belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cindera Mata, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Natura dan Pakan-Pakan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.3.366.449.800,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.526.841.000,00 atau sekitar 95,45%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.3.366.449.800,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sangat baik.

4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.4.856.036.105,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.5.376.843.571,00 atau sekitar 90,31%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.4.856.036.105,00 maka kebutuhan belanja perjalanan dinas telah tercukupi dengan baik dan telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sangat baik.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

5.1 Pengadaan Mebel

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pengadaan Mebel. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Modal Mebel, Belanja Modal Meja Kerja Pejabat, Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat, Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat, Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat, dan Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat, dan Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.410.247.100,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.663.005.000,00 atau sekitar 84,80%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.1.410.247.100,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan baik.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.3.217.518.558,00 dari alokasi anggaran

sebesar Rp.3.502.043.300,00 atau sekitar 91,88%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.3.217.518.558,00 maka kebutuhan telepon, air, listrik internet dan TV Berlangganan telah tercukupi dengan baik dan telah mendukung pencapaian target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sangat baik.

6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, dan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.7.907.242.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.944.460.000,00 atau sekitar 99,53%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.7.907.242.000,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sangat baik.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Kegiatan

tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, dan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.055.661.773,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.436.560.000,00 atau sekitar 73,49%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.1.055.661.773,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan cukup baik.

7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya, Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan, dan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.188.181.517,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.760.400.000,00 atau sekitar 67,49%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.1.188.181.517,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan cukup baik.

7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan, dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.131.121.627,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.291.120.000,00 atau sekitar 87,61%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.1.131.121.627,00 telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik.

7.4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bahan-bahan Kimia, Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi, Belanja Asuransi Barang Milik Daerah, Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, dan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.2.754.590.100,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.875.933.660,00 atau sekitar 95,78%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.2.754.590.100,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sangat baik.

7.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja

Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, dan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.639.216.899,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.640.020.000,00 atau sekitar 99,95%. Dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.1.639.216.899,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sangat baik.

8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

8.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH, Belanja Tunjangan Bersama KDH/WKDH, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH, Belanja Pembulatan Gaji KDH/Wkdh, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH dan Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.167.811.924,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.990.417.230,00 atau sekitar 16,94%. Walaupun realisasi kegiatan ini hanya 16,94% akan tetapi Kebutuhan Gaji dan

Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah tercukupi hingga mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik.

8.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU), Belanja Pakaian Adat Daerah, Belanja Pakaian Batik Tradisional, dan Belanja Jasa Tenaga Ahli . Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.475.830.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.598.680.000,00 atau sekitar 79,48%. Walaupun realisasi kegiatan ini hanya 79,48% akan tetapi Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah tercukupi hingga mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cukup baik.

8.3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Medical Check Up. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.53.736.762,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.91.000.000,00 atau sekitar 59,05%. Walaupun realisasi kegiatan ini hanya 59,05% akan tetapi Kebutuhan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah tercukupi hingga mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cukup baik.

8.4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Dana Operasional KDH/WKDH. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.420.376.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.420.405.198,00 atau sekitar 99,99%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 99,99% maka sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah tercukupi hingga mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan sangat baik.

9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

9.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga, dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.571.499.200,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.668.676.500,00 atau sekitar 85,47%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.571.499.200,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik.

9.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Natura dan Pakan-Natura, dan Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.436.239.500,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.482.053.650,00 atau sekitar 90,50%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.436.239.500,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan sangat baik.

9.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Natura dan Pakan-Natura, Belanja Natura dan Pakan-Pakan, dan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.062.172.969,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.841.000,00 atau sekitar 88,45%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.1.062.172.969,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan sangat baik.

10. Penataan Organisasi terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

10.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariar Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket

Meeting Luar Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.319.927.069,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.321.430.000,00 atau sekitar 99,53%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.319.927.069,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Penataan Organisasi dengan sangat baik.

10.2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.205.072.299,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.206.248.000,00 atau sekitar 99,43%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.205.072.299,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Penataan Organisasi dengan sangat baik.

10.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan tersebut guna

pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariar Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.233.922.246,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.235.160.000,00 atau sekitar 99,47%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.233.922.246,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Penataan Organisasi dengan sangat baik.

10.4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.122.381.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.122.900.000,00 atau sekitar 99,58%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.122.381.000,00 maka

telah mendukung pencapaian target kegiatan Penataan Organisasi dengan sangat baik.

10.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.267.102.577,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.267.630.000,00 atau sekitar 99,80%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.267.102.577,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Penataan Organisasi dengan sangat baik.

11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

11.1 Fasilitasi Keprotokolan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Belanja Pakaian Batik Tradisional, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.5.643.364.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.5.653.610.350,00 atau sekitar 99,80%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.5.643.364.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sangat baik.

11.2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Olahraga, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan, dan Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.3.245.994.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.289.010.000,00 atau sekitar 98,69%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.3.245.994.000,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sangat baik.

11.3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Modal Sepatu Lapangan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.2.031.747.075,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.135.072.000,00 atau sekitar 95,16%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.2.031.747.075,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan sangat baik.

2.3.2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, ada 4 kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Administrasi Tata Pemerintahan terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Penataan Administrasi Pemerintahan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.281.788.867,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.363.590.000,00 atau sekitar 77,50%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 77,50% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan cukup baik.

1.2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahannya. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja

Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Belanja Pakaian Batik Tradisional, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, dan Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.2.037.423.183,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.720.645.000,00 atau sekitar 74,89%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar Rp.2.037.423.183,00 maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan cukup baik.

1.3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.72.242.470,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.136.410.000,00 atau sekitar 52,96%. Dengan terealisasi

kegiatan ini sebesar 52,96% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan cukup baik.

2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

2.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sувenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Belanja Pakaian Batik Tradisional, Belanja Pakaian Olahraga, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Paket/Pengiriman, Belanja Registrasi/Keanggotaan, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya, Belanja Sewa Alat Pendingin, Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Sewa Pagar, Belanja Sewa Audio Visual, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, dan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela

Bersifat Sosial Kemasyarakatan . Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.7.164.785.202,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.7.302.924.000,00 atau sekitar 98,11%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 98,11% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sangat baik.

2.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.578.178.926,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.675.930.000,00 atau sekitar 85,54%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 85,54% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sangat baik.

2.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan

terkait Kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Penyelenggaran Acara, Belanja Sewa Asrama, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.449.331.736,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.466.829.900,00 atau sekitar 96,25%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 96,25% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan sangat baik.

2.4 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.80.401.715,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.113.891.000,00 atau sekitar 70,60%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 70,60% maka telah

mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan cukup baik.

2.5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Rohaniwan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.82.361.127,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.384.684.000,00 atau sekitar 21,41%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 21,41% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan cukup baik.

3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

3.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.419.369.320,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.419.541.900,00 atau sekitar 99,96%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 99,96% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan sangat baik.

3.2 Fasilitasi Bantuan Hukum

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Rohaniwan, Belanja Registrasi/Keanggotaan, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, dan Belanja Modal Tanah Persil

Lainnya. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.29.066.171.653,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.29.129.000.000,00 atau sekitar 99,78%. Walaupun realisasi kegiatan ini hanya sebesar 99,78% akan tetapi tetap mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan cukup baik.

3.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.317.817.300,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.318.500.000,00 atau sekitar 99,79%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 99,79% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan sangat baik.

4. Fasilitasi Kerjasama Daerah terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

4.1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sувenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Batik Tradisional, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Rohaniwan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Registrasi/Keanggotaan, Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.2.926.721.173,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.997.750.000,00 atau sekitar 97,63%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 97,63% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan sangat baik.

4.2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan,

Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Rohaniwan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan, Belanja Registrasi/Keanggotaan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.945.754.766,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.959.033.000,00 atau sekitar 98,62%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 98,62% akan tetapi tetap mendukung pencapaian target kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan sangat baik.

4.3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Rohaniwan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.239.625.060,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.271.288.600,00 atau sekitar 88,33%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 88,33% maka telah mendukung

pencapaian target kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan baik.

2.3.3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, ada 4 kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan BLUD

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMN dan BLUD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.226.944.527,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.230.278.700,00 atau sekitar 98,55%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 98,55% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan sangat baik.

1.2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.923.343.085,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.969.720.000,00 atau sekitar 95,22%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 95,22% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan sangat baik.

1.3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Perjalanan Dinas

Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.284.368.900,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.307.446.700,00 atau sekitar 92,49%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 92,49% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan sangat baik.

1.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.229.766.058,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.230.251.700,00 atau sekitar 99,79%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 99,79% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan baik.

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

2.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Bimbingan Teknis, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.319.787.424,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.364.000.000,00 atau sekitar 87,85%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 87,85% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan sangat baik.

2.2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Honorarium

Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Modal Sepatu Lapangan. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.635.825.340,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.801.528.000,00 atau sekitar 79,33%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 79,33% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan baik.

2.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Belanja Modal Personal Computer . Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.498.394.379,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.550.550.000,00 atau sekitar 90,53%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 90,53% maka telah mendukung

pencapaian target kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan sangat baik.

3. **Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

3.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Bimbingan Teknis, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.1.571.066.889,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.599.645.000,00 atau sekitar 98,21%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 98,21% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan sangat baik.

3.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dan Belanja Modal Peralatan Personal Komputer. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.520.551.453,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.530.119.000,00 atau sekitar 98,20%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 98,20% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan sangat baik.

3.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.352.236.130,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.364.000.000,00 atau sekitar 96,77%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 96,77% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan cukup baik.

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

4.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Rohaniwan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.137.417.182,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.168.350.000,00 atau sekitar 81,63%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 81,63% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan baik.

4.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah

menyerap dana sebesar Rp.321.022.923,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.358.750.000,00 atau sekitar 89,48%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 89,48% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan sangat baik.

4.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air. Kegiatan tersebut guna pemenuhan kebutuhan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Rohaniwan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.164.212.260,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.168.350.000,00 atau sekitar 97,54%. Dengan terealisasi kegiatan ini sebesar 97,54% maka telah mendukung pencapaian target kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan sangat baik.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sebagian besar pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Target yang tidak dapat dicapai pada umumnya merupakan kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi pelaksanaannya serta kegiatan yang pelaksanaannya sangat terkait/tergantung situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan.

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Pencapaian target kinerja Anggaran Sekretariat Kota Samarinda secara keseluruhan dapat dikatakan tercapai dengan baik, hanya ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai yakni :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.167.811.924,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.990.417.230,00 atau sekitar 16,94%.

2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.53.736.762,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.91.000.000,00 atau sekitar 59,05%.

3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar

Rp.72.242.470,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.136.410.000,00 atau sekitar 52,96%

4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Kegiatan ini telah menyerap dana sebesar Rp.82.361.127,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.384.684.000,00 atau sekitar 21,41%.

Adapun hambatan dan kendala pencapaian target dari ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menyerap dana sebesar Rp.167.811.924,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.990.417.230,00 atau sekitar 16,94%. Hal ini terjadi karena penyerapan anggaran hanya sesuai kebutuhan saja. Walaupun realisasi anggaran sub kegiatan ini kecil tetapi Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah terpenuhi dengan sangat baik.

2. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menyerap dana sebesar Rp.53.736.762,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.91.000.000,00 atau

sekitar 59,05%. Hal ini terjadi karena penyerapan anggaran hanya sesuai kebutuhan saja. Walaupun realisasi anggaran sub kegiatan ini kecil tetapi Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah terpenuhi dengan sangat baik.

3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah telah menyerap dana sebesar Rp.72.242.470,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.136.410.000,00 atau sekitar 52,96%.

Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Efisiensi pelaksanaan kegiatan

Beberapa kebutuhan belanja dapat ditekan melalui penggunaan fasilitas internal pemerintah daerah atau dukungan dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota samarinda, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari perencanaan awal.

2. Perubahan jadwal kegiatan

Sebagian agenda fasilitasi (misalnya workshop, rapat koordinasi, atau bimbingan teknis) mengalami penyesuaian jadwal akibat keterbatasan waktu, sehingga pelaksanaan hanya sebagian dari rencana semula Seperti Perjalanan Dinas dan Agenda Luar Daerah Lainnya

3. Kegiatan tidak dapat direalisasikan penuh

Terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan koordinasi lintas perangkat daerah, atau faktor eksternal (misalnya agenda nasional yang bersinggungan dengan kegiatan daerah).

4. Ada Beberapa Kegiatan Yang Mendapat Support dari bagian Umum Sekretariat daerah terutama dan bantuan misal : konsumsi makan minum dan belanja Alat Tulis Kantor.

4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam tahun 2024 sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing telah menyerap dana sebesar Rp.82.361.127,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.384.684.000,00 atau sekitar 21,41%. Hal ini disebabkan ada belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yaitu hibah uang kepada Kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat sebesar Rp. 300.000.000,00 tidak dapat diproses pencairannya.

BAB IV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

4.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Kota

i. Pendapatan – LRA Rp. 84.000.000,00

Pendapatan – LRA merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.84.000.000,00 atau sekitar 93,33%. Pendapatan Retribusi Daerah ini merupakan hasil dari Penyewaan Bis Pemkot Samarinda.

ii. Belanja Rp . 149.565.029.710,00

Pada LRA Sekretariat Kota Samarinda Tahun 2024 Jumlah Belanja sebesar Rp.149.565.029.710,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.115.589.702.395,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.33.975.327.315,00.

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 pada Sekretariat Kota Samarinda adalah sebesar Rp.115.589.702.395,00 atau sekitar 92,37% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.125.138.823.117,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp.9.225.091.093,85. Belanja Operasi ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.33.021.985.713,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.77.891.592.682,00, dan Belanja Hibah sebesar Rp.4.676.124.000,00.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 pada Sekretariat Kota Samarinda adalah sebesar Rp.33.975.327.315,00 atau sekitar 98,24% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.34.584.319.594,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp.17.068.980.179,00. Belanja

Modal ini terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.28.519.000.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.5.082.461.440,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.343.865.875,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.30.000.000,00.

Adapun rincian Belanja Sekretariat Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

NO	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA
			(Rp)	(%)	
1	BELANJA OPERASI	125,138,823,117.00	115,589,702,395.00	92.37	9,549,120,722.00
1	Belanja Pegawai	35,963,899,487.00	33,021,985,713.00	91.82	2,941,913,774.00
2	Belanja Barang dan Jasa	84,118,799,630.00	77,891,592,682.00	92.60	6,227,206,948.00
3	Belanja Hibah	5,056,124,000.00	4,676,124,000.00	92.48	380,000,000.00
2	BELANJA MODAL	34,584,319,594.00	33,975,327,315.00	98.24	608,992,279.00
1	Belanja Modal Tanah	28,519,000,000.00	28,519,000,000.00	100.00	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,609,708,634.00	5,082,461,440.00	90.60	527,247,194.00
3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	360,610,960.00	343,865,875.00	95.36	16,745,085.00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95,000,000.00	30,000,000.00	31.58	65,000,000.00
	JUMLAH	159,723,142,711.00	149,565,029,710.00	93.64	10,158,113,001.00

4.2 Penjelasan Neraca

4.2.1 ASET Rp **251.724.438.474,50**

4.2.1.1 Aset Lancar Rp **2.468.211.643,50**

1. Beban Dibayar Di Muka Rp **2.220.275.443,50**

Jumlah tersebut merupakan Beban Dibayar Di Muka atas Biaya Asuransi Gedung Kantor Sekretariat Kota Samarinda, Asuransi Kendaraan Bermotor Belanja Sewa Asrama, dan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor

Penumpang, dan Kelebihan Pembayaran BPJS Kesehatan Non ASN yang dapat disajikan dari daftar berikut :

ASURANSI DIBAYAR DI MUKA PER 31 DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	RINCIAN	JUMLAH
1	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang kepada PT. CSM CORPORATAMA	Mobil Land Rover Defender 110 x Dynamic SE)	Rp 1,815,000,000.00
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Toyota Hilux Double Cabin 2.4 G (4x4) MT Diesel 2022	Rp 15,000,000.00
		Toyota All New Veloz 1.5 Q CVT 2022	Rp 14,400,000.00
		Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 AT	Rp 14,030,000.00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	All New Veloz C CVT A/T	Rp 28,800,000.00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Mitsubishi All New Pajero Sport Dakar 4x2 AT	Rp 56,000,000.00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Pajero Sport Dakar 2.4 4x2 AT D 23	Rp 28,000,000.00
6	Belanja Sewa Asrama kepada MARTHA ROMA ANDILOLO	Belanja Sewa Asrama	Rp 45,000,000.00
7	Asuransi Gedung Kantor dan Rumah Dinas KDH/WKDH kepada PT. ASURANSI BINTANG TBK	Premi Asuransi Gempa Bumi Indonesia	Rp 165,250,000.00
		Premi Asuransi Komprehensif Properti	
8	Asuransi Kendaraan Bermotor kepada PT. Asuransi Intra Asia	Premi Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 8,923,166.67
9	Asuransi Kendaraan Bermotor kepada PT. Asuransi Bintang, Tbk	Premi Asuransi Kendaraan Bermotor	Rp 7,769,997.83
10	Kelebihan Pembayaran BPJS Kesehatan Non ASN Tahun 2024	Kelebihan Pembayaran BPJS Kesehatan Non ASN Iuran 1 % Tahun 2024	Rp 22,102,279.00
JUMLAH			2,220,275,443.50

2. Persediaan Rp 247.936.200,00

Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan, Belanja Souvenir/Cenderamata, Belanja Natura & Pakan-Pakan, dan Belanja Alat Pembersih yang ada pada Sekretariat Kota Samarinda per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Belanja Alat Tulis kantor (ATK)	Rp 50,539,000.00
2	Belanja Cetak	Rp 67,531,000.00
3	Belanja Souvenir /Cenderamata	Rp 86,757,000.00
4	Belanja Natura & Pakan-Pakan	Rp 41,531,200.00
5	Belanja Alat Pembersih	Rp 1,578,000.00
	Jumlah	Rp 247,936,200.00

4.2.1.2 Aset Tetap Rp 248.839.275.391,00

1. Tanah Rp 225.322.931.772,00

Merupakan nilai tanah yang dimiliki/ dan atau dikuasai Sekretariat Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2024 dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

2. Peralatan dan Mesin Rp 90.125.682.164,00

Merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki/ dan atau dikuasai Sekretariat Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2024 dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

3. Gedung dan Bangunan Rp 37.744.867.740,00

Merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki/ dan atau dikuasai Sekretariat Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2024 dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

4. Aset Tetap Lainnya Rp 464.811.000,00

Merupakan nilai aset tetap lainnya yang dimiliki/ dan atau dikuasai Sekretariat Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2024 dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

5. Konstruksi Dalam Penggerjaan Rp 224.072.000,00

Merupakan nilai Konstruksi Dalam Penggerjaan yang dimiliki/ dan atau dikuasai Sekretariat Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2024 dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

6. Akumulasi Penyusutan (Rp 105.043.089.285,00)

Merupakan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap yang dimiliki Sekretariat Kota Samarinda.

4.2.1.3 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya Rp. 416.951.440,00

Merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai Sekretariat Kota Samarinda sampai dengan 31 Desember 2024 berupa Aset Tidak Berwujud Lainnya, Aset Lain-lain, dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, yaitu sebagai berikut :

1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Rp2.094.353.600,00
2	Aset Lain-lain	Rp 2.950.000,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(Rp1.680.352.160,00)
		Rp 416.951.440,00

4.2.2 Kewajiban Rp **276.607.119,00**

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp **276.607.119,00**

Kewajiban Jangka Pendek tersebut terdiri dari Utang Belanja sebesar Rp.276.607.119,00.

Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut :

1. Utang Belanja Rp. **276.607.119,00**

Saldo Utang Belanja Tahun 2023 adalah sebesar Rp.356.260.424,00 yang terdiri dari Utang Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp.54.750.000,00, Utang Belanja Modal Mesin Hitung / Mesin Jumlah sebesar Rp.24.900.000,00, dan Belanja Accrued sebesar Rp.276.610.424,00.

Pada tahun 2024 semua Utang Belanja Tahun 2023 telah dilakukan pembayaran sehingga tidak ada lagi sisa Utang Belanja Tahun 2023. (*Daftar Pembayaran Utang Sekretariat Kota Samarinda terlampir*).

Tahun 2024 terdapat penambahan Utang Belanja yang terdiri dari Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.3.375.000,00, dan Belanja Accrued sebesar Rp.251.130.296,00. Pada tahun 2025 dilakukan Rekonsiliasi atas pembayaran BPJS Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN antara pihak BPJS dengan Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Dari hasil rekonsiliasi tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat kekurangan pembayaran iuran 4% jaminan kesehatan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp.22.101.823,00 sehingga menambah nilai Utang Belanja pada

Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Sehingga total Utang Belanja yang dimiliki Sekretariat Kota Samarinda pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp.276.607.119,00 (*Surat Pernyataan Utang dan Rekapitulasi Utang Sekretariat Kota Samarinda terlampir*).

4.2.3 Ekuitas Rp. 251.447.831.355,50

Ekuitas Sekretariat Kota Samarinda per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.251.447.831.355,50.

Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih yang dimiliki Sekretariat Kota Samarinda yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp.251.724.438.474,50 dengan kewajiban sebesar Rp.276.607.119,00.

4.3 Penjelasan Laporan Operasional Kegiatan Operasional

1. Dalam Laporan Operasional Sekretariat Kota Samarinda tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa terdapat Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.84.000.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp.38.250.000,00 atau sekitar 31,29%.
 2. Beban Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.129.737.768.454,92 yang bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.3.577.275.461,68 atau sekitar 2,68%

Beban ini terdiri dari :

 - 2.1 Beban Operasi sebesar Rp.129.737.768.454,92 yang terdiri dari :
 - Beban Pegawai sebesar Rp.33.025.360.713,00 yang bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.094.241.966,00 atau sekitar 10,34%.

- Beban Barang dan Jasa sebesar Rp.81.813.617.093,92 yang bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.9.754.399.445,68 atau sekitar 10,65%.
 - Beban Hibah sebesar Rp.4.676.124.000 yang bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.676.124.000 atau sekitar 100%.
- 2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.10.222.666.648,00 yang bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.1.593.241.982,00 atau sekitar 13,48%.

Dari nilai Pendapatan dan Beban tersebut didapatkan Defisit-LO sebesar (Rp.129.653.768.454,92).

4.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas Sekretariat Kota Samarinda tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa terdapat Ekuitas Awal sebesar Rp.231.620.650.100,42 dan Defisit-LO pada tahun 2023 sebesar (Rp.129.653.768.454,92), dan terdapat RK PPKD sebesar Rp.149.481.029.710,00, serta Koreksi Lain-Lain sebesar (Rp.80.000,00) sehingga didapat Ekuitas Akhir sebesar Rp.251.447.831.355,50.

BAB V. PENUTUP

Laporan Keuangan Sekretariat Kota Samarinda yang disusun dengan menggunakan alat bantu software SIPD yang diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah yang memadai.

Dari uraian yang disajikan pada bab-bab terdahulu dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Sekretariat Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebesar Rp.84.000.000,00 atau sekitar 93,33%. Pendapatan ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah berupa hasil dari Penyewaan Bis Pemkot Samarinda selama tahun 2024.
2. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 pada Sekretariat Kota Samarinda adalah sebesar Rp.115.589.702.395,00 atau sekitar 92,37% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.125.138.823.117,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp.9.225.091.093,85. Belanja Operasi ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.33.021.985.713,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.77.891.592.682,00, dan Belanja Hibah sebesar Rp.4.676.124.000,00.
3. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 pada Sekretariat Kota Samarinda adalah sebesar Rp.33.975.327.315,00 atau sekitar 98,24% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp.34.584.319.594,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023

jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp.17.068.980.179,00. Belanja Modal ini terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp.28.519.000.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.5.082.461.440,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.343.865.875,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.30.000.000,00.

4. Terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya di bawah atau sekitar 50% yakni :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menyerap dana sebesar Rp.167.811.924,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.990.417.230,00 atau sekitar 16,94%. Hal ini terjadi karena penyerapan anggaran hanya sesuai kebutuhan saja.

- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam tahun 2024 sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menyerap dana sebesar Rp.53.736.762,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.91.000.000,00 atau sekitar 59,05%. Hal ini terjadi karena penyerapan anggaran hanya sesuai kebutuhan saja.

- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dalam tahun 2024 telah direalisasikan sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah telah menyerap dana sebesar

Rp.72.242.470,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.136.410.000,00 atau sekitar 52,96%

- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam tahun 2024 sub kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing telah menyerap dana sebesar Rp.82.361.127,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.384.684.000,00 atau sekitar 21,41%. Hal ini disebabkan ada belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yaitu hibah uang kepada Kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat sebesar Rp. 300.000.000,00 tidak dapat diproses pencairannya.

Demikian Laporan Keuangan Sekretariat Kota Samarinda , semoga kita selalu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah SWT untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Samarinda, 20 Juni 2024
PENGGUNA ANGGARAN

HERO MARDANUS SATYAWAN